



PEMERINTAH
KABUPATEN
TEMANGGUNG

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

RENCANA KERJA TAHUN 2026

BADAN
KESATUAN
BANGSA
DAN
POLITIK

JL SETIABUDI NOMOR 1 TEMANGGUNG
Telp (0293) 491048 faximili (0293) 491313
Email : kesbangpoltemanggung672@gmail.com

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026

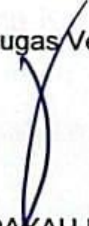
disusun Oleh :
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 31 Juli 2025

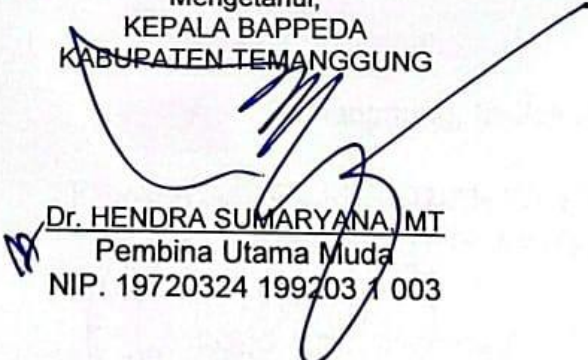
Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
dan Pemerintahan


EWIEK KHAVIDA, S.STP, MM
NIP. 19831118200212 2 001

Petugas Verifikator


FIKA HIDAYAH LUSIANI, ST
NIP. 19790924 200312 2 006

Mengetahui,
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG


Dr. HENDRA SUMARYANA, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 199203 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2026.

Rencana kerja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk satu tahun ke depan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dimulai tahun 2024 sampai tahun 2026. Dengan memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu satu tahun di tahun 2026.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 ini.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja ini dapat berguna dan bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 31 Juli 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TEMANGGUNG



DIKHO BRASETYONO, S.Sos. MM

Pembina Utama Muda

NIP.19721126 199203 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR VERIFIKASI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	11
BAB III TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN	48
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	23
BAB V PENUTUP	67

BAB I

PENDAHULUAN

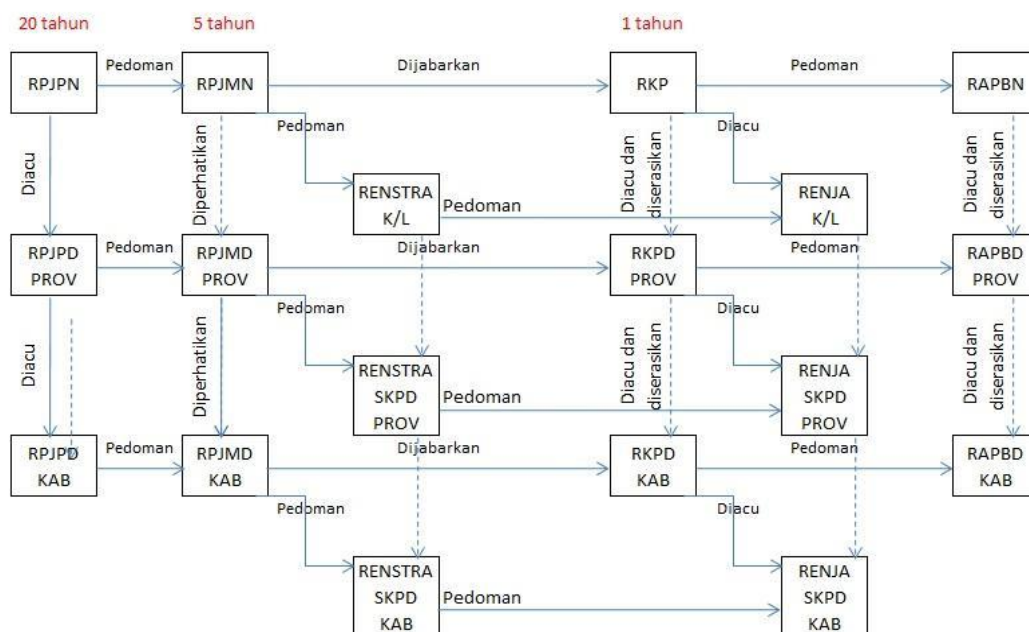
1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2026 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 2) Kondisi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 4) Data Pokok Pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

b. Analisis gambaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk kondisi tahun 2025-2029;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, dan realisasi tahun 2024 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2024;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun lalu berdasarkan renstra Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan

bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 3) Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program

atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Penyempurnaan rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan renja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan saran dan masukan dari *stakeholder* terkait dan tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
13. Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 adalah sebagai pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2026 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama kurun waktu Tahun 2026;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029

Dalam melakukan penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 terhadap capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2025.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2025 terhadap target di Tahun 2025.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2025 sebagai tahun pertama pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2025-2029 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
s.d Tahun 2024

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	9	10	11	20	21	22	23
01.02	PRGOGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN						48.381.100	565.000.000		559.748.500		99,07
		Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	%	100		62			100		100	
01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	dokumen			2	48.381.100		0	0	0	0,00
8.1.2.201.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang			90		565.000.000	170	559.748.500	100	99,07
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					100	0	30.489.283.995	0	30.454.859.345	0	99,89
		Persentase pelaksanaan pendidikan politik	%	100		100			87,21		100	
8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	dokumen			12	0	30.489.283.995	12	30.454.859.345	100	99,89
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASIKEMASYARAKATAN						100.000.000	0		0		0
		Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan	%			100			100		100	
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	laporan			11	100.000.000	0	0	0	0	0

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	9	10	11	20	21	22	23
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						185.000.000	185.000.000		184.658.000		99,82
		Persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	100		100			100		100	
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang			300	185.000.000	185.000.000	330	184.658.000	100	99,82
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						1.135.000.000	560.000.000		569.447.500		99,99
		Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik dan keamanan daerah	%	100		100			100		100	
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	orang			100	317.500.000	569.500.000	102	569.447.500	100	99,99
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	laporan			0	10.000.000	0	0	0	-	0
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)				100	578.865.000	605.175.000	100	576.136.902	100	95,20
8.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang			380	175.000.000	200.000.000	380	196.001.540	100	98,00
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket			12	2.500.000	3.000.000	10	2.998.700	100	99,96

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	9	10	11	20	21	22	23
8.01.01.2.06.02	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		paket			8		63.675.000	8	57.691.500	100	90,60
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket			12	7.000.000	10.500.000	12	10.384.700	100	98,90
8.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket			12	6.750.000	7.500.000	12	7.485.500	100	99,81
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan			12	12.000.000	10.500.000	12	10.464.550	100	99,66
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan			12	29.979.000	54.890.400	12	54.890.300	100	100,00
8.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan			12	20.000.000	20.520.000	12	15.360.350	100	74,86
8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan			12	5.000.000	5.000.000	12	4.964.000	100	99,28
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan			12	133.636.000	178.089.600	12	165.878.032	100	93,14
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit			15	32.000.000	40.000.000	12	38.582.230	100	96,46
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit			4	150.000.000	4.000.000	2	3.943.500	100	98,59
8.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit			11	5.000.000	7.500.000	12	7.492.000	100	99,89

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
s.d Triwulan II Tahun 2025

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN				REALISASI 2025		CAPAIAN 2025	
									I		II					
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01.02	PRGOGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN						700.000.000	425.000.000		4.129.500		34.511.250		38.640.750		9,09
		Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	%			100			92,29		100		100,00		100,00	
01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	dokumen			2	75.000.000		0	0	0		0	0	0	0
8.1.2.201.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang			90	625.000.000	425.000.000	323	4.129.500	526	34.511.250	849	38.640.750	242,57	9,09
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DANPENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					100	1.528.595.335	2.606.855.000		1.956.000		2.520.600	0	4.476.600	0	0,17
		Persentase pelaksanaan pendidikan politik	%			100			30,00		60,00		60,00		60	

8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	dokumen		12	1.528.595.335	2.606.855.000	3	1.956.000	3	2.520.600	6	4.476.600	50,00	0,17
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					20.000.000	0	30,00		60,00			0		0
		Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan	%		13,33			20,98		23,78		23,78		100	
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL, DAN BUDAYA					135.000.000	90.000.000						0		0
		Persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%		100			0		100		100		100	
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan	orang		300	135.000.000	90.000.000	30	0	30	0	60	0	50,00	0
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					579.000.000	782.485.500		84.325.000		222.815.000		307.140.000		39,25
		Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik dan keamanan daerah	%		100			0	0	0	0	100		100	

8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	orang			100	574.000.000	510.000.000	50	84.325.000	50	126.0000.000	100	210.325.000	50,00	41,24
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	laporan			72	5.000.000	272.485.500	0	0	33	96.815.000	33	96.815.000	45,83	0
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)				100	403.865.000	338.330.450	30	56.564.136	29	72.522.640	59	129.086.776	100	38,15
8.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	orang			380	250.000.000									
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket			10	10.000.000	3.000.000	2	0	2	32.000	4	32.000	40,00	0,91
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket			8	31.675.000		0	0		0	0	0	0,00	
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket			12	20.000.000	11.057.950	3	0	3	199.000	6	199.000	50,00	1,80
8.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket			12	12.000.000	6.960.000	3	0	3	567.900	6	567.900	50,00	8,16
8.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	laporan			12	18.000.000	17.215.000	3	1.500.950	3	390.050	6	1.891.000	50,00	10,98
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan			12	45.000.000	22.482.500	3	7.572.500	3	6.157.297	6	13.729.797	50,00	61,07
8.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan			12	30.910.400	30.910.400	3	3.869.250	3	3.422.176	6	7.291.426	50,00	23,59
8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	laporan			12	6.000.000	6.000.000	3	730.000	3	231.000	6	961.000	50,00	16,02

		Perlengkapan Kantor yang Disediakan														
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan			12	178.089.600	178.089.600	3	38.035.436	3	49.698.317	6	87.733.753	50,00	49,26
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit			12	40.000.000	40.000.000	3	4.783.500	3	11.054.200	6	15.837.700	50,00	39,59
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit			2	6.000.000	15.000.000	1	72.500	0	687.500	1	760.000	50,00	5,07
8.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit			12	7.500.000	7.115.000	3	0	3	83.200	6	83.200	50,00	1,17

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2024 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berupa:

1. Capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah yang yang memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator sasaran sbb:
Indeks Toleransi
2. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator program sbb:
 - a. Persentase tertanganinya konflik di masyarakat
 - b. Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan
 - c. Persentase pelaksanaan pendidikan politik
 - d. Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan
 - e. Persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - f. Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik dan keamanan daerah
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sbb:
 - a. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
 - b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

- c. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penganan Konflik di Daerah
 - f. Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan
 - g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - h. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - i. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - j. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - k. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - l. Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik
 - m. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - n. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - o. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - p. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4. Capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah yang yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan.
- Tidak ada indikator sasaran perangkat daerah yang tidak memenuhi target kinerja

5. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan.

Tidak ada indikator program perangkat daerah yang tidak memenuhi target kinerja.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2024, maka dapat dikatakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori Sangat Memuaskan yaitu dengan nilai **100%**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Indeks Toleransi

Capaian Kinerja : 100% dengan kategori Sangat Memuaskan

2. Persentase tertanganinya konflik di masyarakat

Capaian Kinerja : 100% dengan kategori Sangat Memuaskan

3. Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan

Capaian Kinerja : 100% dengan kategori Sangat Memuaskan

4. Persentase pelaksanaan pendidikan politik

Capaian Kinerja : 100% dengan kategori Sangat Memuaskan

5. Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan

Capaian Kinerja : 100% dengan kategori Sangat Memuaskan

6. Persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Capaian Kinerja : 100% dengan kategori Sangat Memuaskan

7. Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik dan keamanan daerah

Capaian Kinerja : 100% dengan kategori Sangat Memuaskan

Dari Tabel 2.2 dan Triwulan II tahun 2025 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2025 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah

ditetapkan pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.2.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.3

Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Triwulan II Tahun 2025 **(Laporan IKPD)**

No	Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian s.d TW II 2025	Skala Nilai Peringkat Kinerja					
						2024	2025	2026	2024	2025	2026		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																		
INDIKATOR KINERJA SASARAN																		
			Indeks Toleransi	Angka	4,5	4,5	4,51	4,52	4,5	4,5		99,78	V					
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)																		
		1	Persentase tertanganinya konflik di masyarakat	%	n.a	100	100	100	100,00	100,00		100	V					
				Jumlah Konflik yang tertangani						4	1							
				Jumlah Konflik keseluruhan						4	1							
INDIKATOR PROGRAM																		
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	%	n.a	80	90	100	100,00	242,57		100	V					
				Jumlah masyarakat yang meningkat pemahaman wawasan kebangsaan						863	849							
				jumlah masyarakat yang diberi pembinaan						350	350							
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	2	Persentase pelaksanaan pendidikan politik	%	n.a	80	90	100	100,00	60,00		66,66			V			
				Jumlah pendidikan politik yang dilaksanakan						18	6							
				jumlah pendidikan politik yang direncanakan						10	10							
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	3	Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan	%	n.a	13,33	16,67	20	18,18	23,78		100	V					
				Jumlah ormas yang mendapatkan pembinaan						26	34							
				Jumlah ormas keseluruhan						143	143							
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	4	Persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	n.a	100	100	100	100,00	100,00		100	V					
				Jumlah penghayat aliran kepercayaan yang mendapatkan pembinaan						8	8							
				jumlah seluruh aliran penghayat kepercayaan						8	8							
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	5	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik dan keamanan daerah	%	n.a	100	100	100	100,00	100,00		100	V					
				Jumlah konflik yang tertangani						4	1							
				jumlah keseluruhan konflik						4	1							

Adapun penjelasan untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan skala nilai peringkat kinerja sangat tinggi terdiri dari:
 - a. Persentase tertanganinya konflik di masyarakat.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah terbina sinergitas yang baik dalam mencegah dan menangani konflik
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah adanya kejadian tidak terduga yang tidak dapat diprediksi
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah menjaga kondusivitas wilayah
 - b. Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah banyak kegiatan Badan Kesbangpol yang mendukung dalam penyampaian wawasan kebangsaan kepada masyarakat
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Pengaruh negatif globalisasi menggerus rasa nasionalisme
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah dengan penguatan penyampaian wawasan kebangsaan dan Ideologi Pancasila kepada masyarakat
 - c. Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik dan keamanan daerah
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Terbina sinergitas yang baik dalam mencegah dan menangani konflik
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah adanya kejadian tidak terduga yang tidak dapat diprediksi
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah menjaga kondusivitas wilayah
 - d. Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Antusiasme yang baik dari organisasi masyarakat untuk mengikuti

- kegiatan
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah banyak ormas yang belum terdaftar
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah dengan pemberdayaan ormas yang berkelanjutan
- e. Persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Antusiasme yang baik dari kelompok penghayat untuk mengikuti kegiatan
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah minimnya kegiatan yang melibatkan penghayat aliran kepercayaan
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah membina toleransi, kerukunan antar umat beragama
- 1. Capaian indikator dengan skala nilai peringkat kinerja sedang terdiri dari:
 - a. Persentase pelaksanaan pendidikan politik
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah banyak kegiatan yang mendukung dalam menyampaikan pendidikan politik kepada masyarakat
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah sasaran penerima pendidikan politik tidak dapat direncanakan.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah penguatan penyampaian pendidikan politik

2.2.2 Data Pokok

Data Pokok pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari 2 jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Politik dan Organisasi Masyarakat dan Data Pokok Bidang Kesatuan Bangsa, dengan rincian sebagai berikut :

A. INDEKS TOLERANSI

Pendefinisian toleransi berdasarkan Statistik Modal Sosial Indonesia 2014 adalah “salah satu perwujudan moda social kognitif yang dipahami sebagai sikap mau menerima dan menghargai perbedaan diantara anggota masyarakat”. Komponen toleransi yang ada di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari terlihat dari sikap toleran terhadap persahabatan antar suku bangsa lain dan agama lain maupun aktifitas yang dilakukan oleh sekelompok orang dari agama dan suku lain

**Tabel Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
Indeks Toleransi Tahun 2021 s.d 2025**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Target	0,64	4,15	4,17	4,19	4,5	4,51
Realisasi	4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%	99,78

*Realisasi indikator kinerja pembangunan daerah menggunakan realisasi tahun 2022. Digunakan realisasi angka tahun 2022 karena penghitungan indeks toleransi bekerja sama dengan pihak ketiga, dan mulai 2023 tidak ada alokasi anggaran untuk penghitungan.

Keterangan interval indikator :

Nilai persepsi	Nilai interval	Kinerja
1	< 1,8	Tidak baik
2	1,81 – 2,60	Kurang baik
3	2,61 – 3,40	Cukup baik
4	3,41 – 4,20	Baik
5	4,21 – 5,00	Sangat baik

Keberhasilan terpenuhinya capaian Indeks Toleransi yang diukur dari variabel toleransi agama dan toleransi antar suku; dipengaruhi oleh :

- Faktor pendukung :
 1. Masyarakat yang agamis
 2. Tingginya rasa tepo seliro (tenggang rasa/empati) pada masyarakat di Kab Temanggung

3. Terjalin kekeluargaan, kebersamaan, komunikasi yang baik, dan sikap saling membantu dalam kegiatan masyarakat

- Faktor penghambat:

1. Kesibukan bekerja menyebabkan kurangnya interaksi antar warga
 2. Berkurangnya kegiatan kemasyarakatan karena lebih memilih berinteraksi dengan gadget
 3. Derasnya arus globalisasi yang mendorong pada individualisme
- Outcome / hasil dari indikator ini adalah terciptanya kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Temanggung yang semakin guyub walaupun terdapat perbedaan suku, agama, dan Ras di masyarakat.

1. PERSENTASE TERTANGANINYA KONFLIK DI MASYARAKAT

Konflik adalah Perseteruan dan / atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional (Bidang Kesatuan Bangsa, Bankesbangpol 2024). Dalam penanganan konflik di masyarakat perlu diwaspadai potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum yang dapat berupa aksi unjuk rasa atau demonstrasi, serta munculnya konflik dan kegiatan terorisme atau benturan suku agama dan ras.

Persentase tertanganinya konflik di masyarakat dihitung dengan rumus jumlah konflik yang tertangani dibagi jumlah konflik keseluruhan dikali 100%.

**Tabel 1. Persentase tertanganinya konflik di masyarakat
Triwulan II Tahun 2025**

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah konflik yang tertangani	1	0	8	4	1
2	Jumlah konflik keseluruhan	1	0	8	4	1
3	Persentase tertanganinya konflik di masyarakat	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Kesbangpol 2025

Pada triwulan II ada 1 konflik yang timbul. Faktor pendorong tercapainya indikator persentase tertanganinya konflik di masyarakat adalah adanya sinergitas tim kewaspadaan dini daerah untuk pengawasan sehingga sebelum konflik terjadi telah diadakan mediasi dan musyawarah. Upaya yang dilakukan diantaranya dengan menjalin kerjasama dan koordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah; serta pengoptimalan tim kewaspadaan dini daerah.

2. PERSENTASE PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan dihitung dengan rumus jumlah masyarakat yang meningkat pemahaman wawasan kebangsaan dibagi jumlah masyarakat yang diberi pembinaan dikali 100%.

Tabel 2. Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan Triwulan II Tahun 2025

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah masyarakat yang meningkat pemahaman wawasan kebangsaan	NA	NA	NA	NA	863	849
2	Jumlah masyarakat yang diberi pembinaan	NA	NA	NA	NA	350	350
3	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	NA	NA	NA	NA	100	100

Sumber Badan Kesbangpol 2025

Persentase penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan pada triwulan II tahun 2025 sebesar 100%.

1. Pada tanggal 13 Maret 2025 dilaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan. Jumlah masyarakat yang meningkat pemahaman wawasan kebangsaan dilihat dari jumlah orang yang lolos dalam Tes wawasan kebangsaan. Dari 281 orang yang mendapat wawasan kebangsaan, yang meningkat pemahaman wawasan kebangsaannya sebanyak 274 orang (274 orang tersebut lolos dalam tes wawasan kebangsaan). Pembinaan wawasan kebangsaan dilaksanakan pada:
2. Pada tanggal 1 Juni 2025 Pelaksanaan Diskusi Publik Hari Lahir Pancasila (Seminar Nasional dalam rangka Hari Lahir Pancasila) dengan peserta 500 orang.
3. Pada tanggal 14 Juni 2025 Pelaksanaan Penyampaian Wawasan Kebangsaan dengan Tema Pembumian Nilai-nilai Pancasila sebanyak 50 orang
4. Pada tanggal 18 Juni 2025 Pelaksanaan Penyampaian Wawasan Kebangsaan di hadiri oleh 25 orang guru Pembina tingkat SLTP yang berasal dari kecamatan Bulu, Parakan, Ngadirejo, Bejen, Tretep, dan Wonobojo.
5. Pada tanggal 26 juni 2025 Pelaksanaan Penyampaian Wawasan Kebangsaan Pada Peringatan Hari Anti Narkoba di Kantor BNN Temanggung

Faktor pendorong persentase penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan adalah banyaknya kegiatan yang mendukung dalam menyampaikan wawasan kebangsaan kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan adalah dengan memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat melalui event-event sosialisasi yang ada.

3. PERSENTASE PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, pada Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi partai politik, pemantauan pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, situasi politik serta pembinaan dan pemantauan organisasi kemasyarakatan di daerah.

Pelaksanaan pendidikan politik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bagi seluruh lapisan masyarakat merupakan wujud pengembangan demokratisasi. Berikut ini kami sajikan pelaksanaan kegiatan Pendidikan politik pada Tahun 2025 :

Tabel 3. Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah pendidikan politik yang dilaksanakan	NA	NA	NA	NA	18	6
2	Jumlah pendidikan politik yang direncanakan	NA	NA	NA	NA	10	10
3	Persentase pelaksanaan pendidikan politik	NA	NA	NA	NA	10	60

Sumber: Badan Kesbangpol, 2025

Persentase pelaksanaan pendidikan politik dihitung dengan rumus Jumlah pendidikan politik yang dilaksanakan dibagi dengan jumlah pendidikan politik yang direncanakan dikali 100%.

Pada triwulan II Tahun 2025 ada 3 kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal:

1. 22 Januari 2025 pelaksanaan kegiatan bersama 10 partai politik dalam rangka evaluasi kegiatan 2024 di BPK RI perwakilan Jawa Tengah.
2. 25 Februari 2025 di Omah Kebon, pelaksanaan kegiatan dengan tema “Upaya menciptakan harkamtibmas yang aman dan kondusif pasca Pemilu/ Pilkada 2024 serta antisipasi gangguan kamtibmas menjelang bulan Ramadhan/Idul Fitri”.
3. 22 Maret 2025 di Aula Kecamatan Temanggung, pelaksanaan

kegiatan dengan tema “Pemantapan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya bagi Masyarakat”.

4. 1 Juni 2025 di Pendopo Pengayoman Temanggung, Pelaksanaan kegiatan Diskusi Publik Hari Lahir Pancasila (Seminar Nasional dalam rangka Hari Lahir Pancasila dengan peserta 500 orang
5. 14 Juni 2025 di SMK N 1 Temanggung Pelaksanaan Pendidikan Politik dalam rangka sosialisasi bertemakan Pembumian Nilai-nilai Pancasila.
6. 18 Juni 2025 di Jambu Klutuk Resto Pelaksanaan Pendidikan Politik untuk guru Pembina SLTP yang berasal dari kecamatan Bulu, Parakan, Ngadirejo, Bejen, Tretep, dan Wonoboyo.

Faktor pendorong indikator persentase pelaksanaan pendidikan politik adalah banyak kegiatan yang mendukung dalam menyampaikan pendidikan politik kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diantaranya adalah dengan memberikan informasi/pengetahuan kepolitikan dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kesbangpol dan kegiatan lembaga lain yang melibatkan Badan Kesbangpol.

4. PERSENTASE ORMAS YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. (UU Nomor 17 Tahun 2013)

Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan dihitung dengan rumus jumlah organisasi masyarakat yang mendapat pembinaan dibagi jumlah organisasi masyarakat keseluruhan dikalikan 100%.

Tabel 4. Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah organisasi masyarakat yang mendapat pembinaan	NA	NA	NA	NA	26	34
2	Jumlah organisasi masyarakat keseluruhan	NA	NA	NA	NA	143	143
3	Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan	NA	NA	NA	NA	18,18	23,78

Sumber :Kesbangpol Kab. Temanggung, 2025

Data yang disajikan bersifat akumulatif mulai tahun 2024 sampai dengan 2026. Pada triwulan II tahun 2025 organisasi masyarakat yang telah mendapat pembinaan berasal dari tahun 2024 sebanyak 26 ormas dan tahun 2025 sebanyak 8 ormas sbb :

Pembinaan ormas tahun 2024

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Muhammadiyah | 18. MTA |
| 2. Nahdatul Ulama | 19. Banser |
| 3. FKDM, dan | 20. KOKAM |
| 4. MUI | 21. Rifaiyah, dan |
| 5. FKUB | 22. BAMAG dalam kegiatan |
| 6. Karang Taruna kecamatan se | pengukuhan FKUB dan |
| Kabupaten 31 Desember 2024 | penyampaian pendidikan |
| 7. Tunas Patria 12 Mei 2024 | politik 'Cipta Kondisi |
| 8. KNPI 19 Mei 2024 | Menuju Pilkada Yang Sejuk |
| 9. Senkom 19 Mei 2024 | Dan Damai' |
| 10. Fatayat NU 19 Mei 2024 | 23. GMNI (Gerakan Mahasiswa |
| 11. GRIB Jaya 19 Mei 2024 | Nasional Indonesia) 28 |
| 12. UMRI, 19 Mei 2024 | Oktober 2024 |
| 13. Pemuda Muhammadiyah pada | 24. HMI 28 Oktober 2024 |
| 19 Mei 2024 | 25. PMII 28 Oktober 2024 |
| 14. Muslimat NU | 26. IMM (Ikatan Mahasiswa |
| 15. Aisyiah | Muhammadiyah) 28 |
| 16. Nasyiatul Aisyiah | Oktober 2024. |
| 17. LDII | |

Pembinaan ormas tahun 2025

- | | |
|---|---|
| 1. <u>Perkumpulan Kadipaten Bhumi Phala Temanggung 8 Januari 2025</u> | 6. KNPI di kegiatan Pemberian Sosialisasi Indeks Harmoni tanggal 17 Maret 2025 |
| 2. HMI | 7. <u>Kompadeksi</u> , 21 Maret 2025 |
| 3. GMNI | 8. Banser |
| 4. PMII | 9. Kokam |
| 5. Pembinaan Ormas dan Deklarasi Damai bersama Polres Temanggung 25 Feb Grib, <u>Lindu Aji</u> , <u>GP Ansor</u> , <u>Pemuda Pancasila</u> , <u>KNPI</u> , <u>Banser Squad Garuda Nusantara</u> | 10. Senkom |
| | 11. <u>Yayasan Atap Perempuan</u> i Sosialisasi pemantapan ketahanan ekonomi sosial, budaya bagi masyarakat tanggal 22 Maret 2025 |
| | 12. <u>PWLSI</u> , 14 Februari 2025 |

*hanya 8 ormas yang terhitung dalam penambahan ormas yang mendapat pembinaan di tahun 2025

Faktor pendorong indikator Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan adalah banyak kegiatan yang mendukung dan melibatkan organisasi masyarakat di Kab Temanggung dan antusiasme dari organisasi masyarakat tinggi.

Upaya yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diantaranya adalah penguatan pembinaan kepada organisasi masyarakat dengan melibatkan pada event-event yang ada di Kesbangpol.

5. PRESENTASE PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

Indikator persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dinilai dari jumlah penghayat aliran kepercayaan yang mendapat pembinaan.

Untuk mengetahui hal tersebut digunakan rumus jumlah penghayat aliran kepercayaan yang mendapat pembinaan dibagi jumlah seluruh aliran penghayat kepercayaan, dikalikan 100%.

Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut;

Tabel 5. Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah penghayat aliran kepercayaan yang mendapat pembinaan	NA	NA	NA	NA	8	8
2	Jumlah seluruh aliran penghayat kepercayaan	NA	NA	NA	NA	8	8
3	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	NA	NA	NA	NA	100	100

Sumber :Kesbangpol Kab. Temanggung, 2025

Pada tahun 2025 sampai dengan triwulan II telah dilaksanakan pembinaan terhadap penghayat aliran kepercayaan pada tanggal 6 Mei 2025 yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Negeri Temanggung di Aula Kecamatan Temanggung dengan data sebagai berikut.

1. Paguyuban Hidup Betul alamat Dsn. Lamuk Ds. Legoksari Kec. Tlogomulyo
2. Paguyuban Sumarah alamat Jl. Giyanti Gg. Anggrek No. 1 Temanggung
3. Cahya Buana alamat Candirotto
4. Sapta Dharma alamat Dsn. Kalisat Ds. Kalimanggis Kec. Kaloran
5. Palang Putih Nusantara alamat Ds. Gondang Wayang Kec. Kedu
6. Mardikaning Santosaning Budi (MSB) alamat Badran Kranggan
7. Subud alamat Tawang Sari Kel. Kebonsari Temanggung
8. Paguyuban Dewi Sri Sindoro Kedu alamat Desa Mergowati Kec. Kedu

Faktor pendorong indikator Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya adalah antusiasme dan partisipasi penghayat aliran kepercayaan cukup tinggi pada kegiatan yang berasal dari luar kelompok mereka.

Upaya yang dilakukan Badan Kesbangpol adalah dengan mengikutsertakan dan melibatkan penghayat aliran kepercayaan tersebut pada beberapa kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesbangpol.

6. PERSENTASE TERDETEKSI DAN TERTANGANINYA KONFLIK KEAMANAN DAERAH

Untuk memperoleh persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik dan keamanan daerah diperoleh dengan rumus jumlah konflik yang tertangani dibagi jumlah keseluruhan konflik dikalikan 100%.

Tabel 6. Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik keamanan daerah

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah konflik keamanan daerah yang tertangani	-	-	-	-	4	1
2	Jumlah konflik keamanan daerah keseluruhan	-	-	-	-	4	1
3	Persentase tertanganinya konflik keamanan daerah	-	-	-	-	100	100

Sumber: Badan Kesbangpol 2025

Sampai dengan triwulan II ada 1 konflik keamanan daerah yang muncul. Faktor pendorong tercapainya indikator persentase tertanganinya konflik dan keamanan daerah adalah adanya sinergitas tim kewaspadaan dini daerah untuk pengawasan sehingga sebelum konflik terjadi telah diadakan mediasi dan musyawarah. Upaya yang dilakukan diantaranya dengan menjalin kerjasama dan koordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan aparat.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari 7 indikator, semua indikator telah mencapai target 100 %.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, antara lain:

- Ada 3 (tiga) sub kegiatan yang tidak mendapat anggaran pada DPA tahun 2024 sehingga menghambat pencapaian tugas dan fungsi Kesbangpol yaitu :
 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 2. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penganan Konflik di Daerah
- Minimnya sarana prasarana pegawai (meja, kursi, alat kantor lainnya)
- Tidak ada ruang pertemuan yang layak karena selama ini menggunakan garasi kendaraan

Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar :

- Memunculkan kembali kegiatan yang tidak ada di DPA sebagai dana stimulant untuk mendukung kegiatan tersebut
- Menganggarkan untuk penambahan sarpras kantor

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi

perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Terdapat penambahan anggaran sub kegiatan di luar rancangan awal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu sejumlah 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana table 2.4 berikut:

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2026

RANCANGAN AWAL RKPD 2026

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerj a	Satuan	Pagu Indikatif
8.01.0 2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					
8.01.0 2.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					
8.01.0 2.2.01. 0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Temanggu ng	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2	Dokum en	10.000.000
8.01.0 2.2.01. 0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Temanggu ng	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	53	Orang	425.000.000
8.01.0 3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					

HASIL PENETAPAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satu an	Kebutuhan Dana	Ketera ngan
						7.583.639.84	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN						
8.01.02.2. 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						
8.01.02.2. 01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Temang gung	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2	dok ume n	110.000.000	
8.01.02.2. 01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Temang gung	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	53	oran g	425.000.000	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satu an	Kebutuhan Dana	Ketera ngan
8.01.0 3.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						8.01.03.2. 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						
8.01.0 3.2.01. 0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Temanggung	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	2	dokumen	2.606.885.000	8.01.03.2. 01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Temanggung	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	2	dokumen	1.827.819.500	
8.01.0 4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						
8.01.0 4.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						8.01.04.2. 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						
8.01.0 4.2.01. 0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			40.000.000	8.01.04.2. 01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			40.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satu an	Kebutuhan Dana	Ketera ngan
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						
8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						8.01.05.2.01.0001			Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			100.000.000	
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			80.000.000	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			100.000.000	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satu an	Kebutuhan Dana	Ketera ngan
8.01.0 6.2.01. 0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Temanggu ng	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			263.727.500	8.01.06.2. 01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Temang gung	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			263.727.500	
8.01.0 6.2.01. 0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Temanggu ng	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			0	8.01.06.2. 01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Temang gung	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			272.485.500	
8.01.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
8.01.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.01.01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
8.01.0 1.2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggu ng				4.062.140.885	8.01.01.2. 02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temang gung				4.062.140.885	
8.01.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						8.01.01.2. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
							8.01.01.2. 05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Temang gung	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				
8.01.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						8.01.01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerj a	Satuan	Pagu Indikatif	Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satu an	Kebutuhan Dana	Ketera ngan
8.01.0 1.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			5.000.000	8.01.01.2. 06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			5.000.000	
8.01.0 1.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			16.966.460	8.01.01.2. 06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			16.966.460	
8.01.0 1.2.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			15.000.000,00	8.01.01.2. 06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			15.000.000	
8.01.0 1.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			10.000.000,00	8.01.01.2. 06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			10.000.000	
8.01.0 1.2.06. 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			12.000.000,00	8.01.01.2. 06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			12.000.000	
8.01.0 1.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			50.000.000,00	8.01.01.2. 06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			50.000.000	
8.01.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						8.01.01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
8.01.0 1.2.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			30.910.400,00	8.01.01.2. 08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			30.910.400	
8.01.0 1.2.08. 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			6.000.000,00	8.01.01.2. 08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			6.000.000	
8.01.0 1.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			0	8.01.01.2. 08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			178.089.600	
8.01.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						8.01.01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satu an	Kebutuhan Dana	Ketera ngan
8.01.0 1.2.09. 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Temanggung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			45.000.000,00		8.01.01.2. 09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Temanggung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			45.000.000	
8.01.0 1.2.09. 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			6.000.000,00		8.01.01.2. 09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			6.000.000	
8.01.0 1.2.09. 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			7.500.000,00		8.01.01.2. 09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			7.500.000	

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh perangkat daerah lain dan bukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Namun dalam proses ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.5
Usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
	N I H I L				

2.6 Inovasi Perangkat Daerah

Inovasi yang telah dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2021-2025

No	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1	Monev LPJ Bantuan keuangan partai politik	Badan Kesbangpol, Parpol	APBD	Monitoring ke parpol penerima hibah untuk mengantisipasi kendala yang timbul dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban	LPJ Banpol	Laporan pertanggung jawaban banpol sesuai dan selesai tepat waktu	2021-saat ini

2	Temanggung bergerak melawan narkoba	Kesbangpol, BNN, PKK	APBD	Pembentukan dan penguatan relawan perempuan anti narkoba	Peningkatan peran perempuan (ibu) dalam keluarga untuk mencegah narkoba	Ketahanan keluarga akan membentuk keluarga sejahtera yang bebas dari narkoba	2024
3	Buku Tamu Digital (Kode QR)	Kesbangpol	-	Sistem online yang digunakan untuk mencatat kehadiran tamu secara digital menggunakan laptop, smartphone atau tablet.	Pengelolaan daftar tamu secara real-time, serta pelaporan statistik kehadiran yang dapat diakses kapan saja	Buku tamu digital menggantikan metode manual berbasis kertas dengan solusi yang lebih praktis dan efisien	2025

2. 7 Penghargaan

Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sbb:

Tabel 2.7
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2021-2025

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Penghargaan Bupati Temanggung atas prestasi dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 dengan Predikat BB	Bupati Temanggung		Inspektorat
2	Penghargaan KPU Kab Temanggung atas dukungan dalam mengawal demokrasi dan menjaga kedaulatan rakyat melalui suksesnya Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Temanggung	KPU Kab Temanggung		KPU Kab Temanggung
3	Keberhasilan dalam pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat, yang dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada Tahun 2024. Temanggung menduduki peringkat ke empat se-Jawa Tengah, dengan tingkat partisipasi masyarakat 84,7%	KPU		KPU

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun SDG's. Kebijakan nasional yang diampu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2026, maka tujuan dari penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2026 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan

2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Temanggung pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2025
(menggunakan indikator di RPJMD 2025-2029)

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2026	TARGET KONDISI AKHIR 2030
Meningkatnya kohesi sosial dan rasa aman masyarakat	Menurunnya konflik di masyarakat		Indeks Harmoni			
			Persentase tertanganinya konflik di masyarakat			
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Presentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	%	90	100
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat	%	90	100
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan	%	13,33	13,33
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Jumlah kejadian konflik SARA	%	100	100
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik keamanan daerah	%	100	100
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Ketersediaan Adminstrasi Keuangan yang disusun tepat waktu Persentase Administrasi Kepegawaian, Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia Persentase ketersediaan capaian laporan kinerja			

Sumber : Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Temanggung Tahun 2025-2029.

Kebijakan dan strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung di Tahun 2026 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung di Tahun 2026 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2026 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2026.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Temanggung Tahun 2026

RANCANGAN RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik TAHUN 2026			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026			(+/-)
N o	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	N o	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.062.140.885		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.062.140.885	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.062.140.885		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.062.140.885	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	250.000.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	108.966.460		Administrasi Umum Perangkat Daerah	108.966.460	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.966.460		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.966.460	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	215.000.000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	215.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.910.400		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.910.400	

N o	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	178.089.600
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.500.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.500.000
B	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	535.000.000
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	535.000.000
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	110.000.000
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	425.000.000
C	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.827.819.500
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.827.819.500

N o	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	178.089.600	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.500.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.500.000	
B	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	535.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	535.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	110.000.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	425.000.000	
C	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.827.819.500	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.827.819.500	

N o	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	N o	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.827.819.500		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.827.819.500	
D	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	40.000.000	D	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	40.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	40.000.000		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	40.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	40.000.000		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	40.000.000	
E	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	200.000.000	E	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	200.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	200.000.000		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	200.000.000	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100.000.000		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100.000.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100.000.000		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100.000.000	
F	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	536.213.000	F	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	536.213.000	

N o	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	N o	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indik atif
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	536.213.000		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	536.213.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	263.727.500		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	263.727.500	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	272.485.500		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	272.485.500	

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temanggung Tahun 2026

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa Rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah disesuaikan berdasarkan program, sub kegiatan dan pagu indikatif RKPD.

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Temanggung Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIOD E RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIO NAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						7.583.639.845,00							8.574.122.585,00	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						7.583.639.845,00							8.574.122.585,00	
	8,01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						7.583.639.845,00							8.574.122.585,00	
1	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	4.444.607.345,00						-	4.468.696.085,00	
	8.01.01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.062.140.885,00			-	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	4.062.140.885,00	BADAN KESATUA N BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2. 02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/ bulan			23 Orang/bul an	4.062.140.885,00	Sem ua Kota/ Kab, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		4.062.140.885,00	BADAN KESATUA N BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIOD E RENTS RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	108.966.460,00			-	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	112.000.000,00	BADAN KESATUA N BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2. 06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket			10 Paket	5.000.000,00	Kab. Tem angg ung, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		5.000.000,00	BADAN KESATUA N BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2. 06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	3 Paket			3 Paket	16.966.460,00	Kab. Tem angg ung, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		20.000.000,00	BADAN KESATUA N BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2. 06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIOD E RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIO NAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket			12 Paket	15.000.000,00	Kab. Tem angg ung, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		15.000.000,00	BADAN KESATUA N BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2. 06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggand aan yang Disediakan</i>	12 Paket			12 Paket	10.000.000,00	Kab. Tem angg ung, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		10.000.000,00	BADAN KESATUA N BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2. 06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	12 Lapora n			12 Laporan	12.000.000,00	Sem ua Kota/ Kab, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		12.000.000,00	BADAN KESATUA N BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2. 06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIOD E RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIO NAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Lapora n			12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Tem angg ung, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		50.000.000,00	BADAN KESATUA N BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	215.000.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	236.055.200,00	BADAN KESATUA N BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2. 08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Komunikas i, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Lapora n			12 Laporan	30.910.400,00	Kab. Tem angg ung, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		30.910.400,00	BADAN KESATUA N BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2. 08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIOD E RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIO NAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	10 Lapora n			10 Laporan	6.000.000,00	Kab. Tem angg ung, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		6.000.000,00	BADAN KESATUA N BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2. 08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lapora n			12 Laporan	178.089.600,00	Kab. Tem angg ung, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		199.144.800,00	BADAN KESATUA N BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	58.500.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	58.500.000,00	BADAN KESATUA N BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2. 09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIOD E RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIO NAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasion al atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinann ya	12 Unit			12 Unit	45.000.000,00	Kab. Tem angg ung, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		45.000.000,00	BADAN KESATUA N BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2. 09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilita si	3 Unit			3 Unit	6.000.000,00	Kab. Tem angg ung, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		6.000.000,00	BADAN KESATUA N BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2. 09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	10 Unit			10 Unit	7.500.000,00	Kab. Tem angg ung, Sem ua Keca mata n, Sem ua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap	-		7.500.000,00	BADAN KESATUA N BANGSA DAN POLITIK
2	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	-			-	435.000.000,00						-	510.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIOD E RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIO NAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.02.2. 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-			-	435.000.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap	-	-	510.000.000,00	BADAN KESATUA N BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2. 01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			umlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2 Dokum en			2 Dokumen	110.000.000,00	Kab. Tem angg ung, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap	-		85.000.000,00	BADAN KESATUA N BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2. 01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			umlah Orang yang Mengikuti koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	350 Orang			350 Orang	425.000.000,00	Kab. Tem angg ung, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Penguatan reformasi birokrasi dan	-		425.000.000,00	BADAN KESATUA N BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIOD E RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIO NAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-	-			-	1.827.819.500.000 ,00					-	-	2.606.885.000,00	
	8.01.03.2. 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi	-	-			-	1.827.819.500.00 0,00			-	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap	-	-	2.606.885.000,00	BADAN KESATUA N BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2. 01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
		umlah kebijakan di bidang PendidikaPolitik Etika Budaya Politik,Peningk tanDemokrasi, fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum yg disusun	10 Dokum en				10 Dokumen	1.827.819.500.00 0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program	-		2.606.885.000,00	BADAN KESATUA N BANGSA DAN POLITIK
4	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-	-			-	40.000.000,00				Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia	-	-	40.000.000,00	
	8.01.04.2. 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-			-	40.000.000,00			-	Berdaya Saing Dan Berkarakter Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap	-	-	40.000.000,00	Bankesban gpol

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIOD E RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PD PENANGGU NG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIO NAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.04.2. 01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftara n Ormas, Pemberda yaan Ormas, Daerah</i>	1 Lapora n			1 Laporan	40.000.000,00	Kab. Tem anggg ung, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap	-		40.000.000,00	BADAN KESATUA N BANGSA DAN POLITIK
5	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANANEKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-	-			-	200.000.000,00						-	160.056.000,00	
	8.01.05.2. 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-			-	200.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	160.056.000,00	BADAN KESATUA N BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2. 01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan</i>	1 Dokum en			1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Tem anggg ung, Sem ua Keca mata n,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		80.056.000,00	BADAN KESATUA N BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2. 01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIOD E RENST RA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN ARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIO NAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya</i>	120 Orang			120 Orang	100.000.000,00	Kab. Tem angg ung, Sem ua Keca mata n,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Penguatan reformasi birokrasi	-		80.000.000,00	BADAN KESATUA N BANGSA DAN POLITIK
6	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	-			-	536.213.000,00						-	788.485.500,00	
	8.01.06.2. 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-			-	536.213.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap	-	-	788.485.500,00	BADAN KESATUA N BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2. 01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaa n Dini, Kerja Sama Intelijen, Penanganan Konflik di Daerah</i>	100 Orang			100 Orang	263.727.500,00	Kab. Tem angg ung, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program	-		516.000.000,00	BADAN KESATUA N BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2. 01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIOD E RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIO NAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspad aan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantau an Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspad aan Perbatasa n antar Negara, Fasilitasi Kelembaga an Bidang Kewaspad aan, serta Penangan an Konflik di Daerah	11 Lapora n			11 Laporan	272.485.500,00	Kab. Tem ang gung, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DBH CUKAI HASIL TEMBAK AU (CHT)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		272.485.500,00	BADAN KESATUA N BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H							7.583.639.845,00						8.574.122.585,00		

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2026 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2026. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2026 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Belanja Operasi sebesar 98,75 %, sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 sampai dengan semester I telah terealisasi sebesar 28%

Dalam Renja Tahun Anggaran 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendapat alokasi anggaran keseluruhan sebesar Rp. 7.583.639.845,00 yang terbagi untuk pembiayaan bidang kesatuan bangsa, bidang politik dan organisasi masyarakat dan kesekretariatan.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TEMANGGUNG

